

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh persepsi transparansi kebijakan terhadap tingkat kepercayaan publik dalam implementasi kebijakan *Transit-Oriented Development* (TOD) di kawasan Lebak Bulus, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Persepsi transparansi kebijakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan publik.** Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien regresi sebesar 0,625 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan persepsi transparansi kebijakan akan diikuti dengan peningkatan tingkat kepercayaan publik. Hubungan yang terbentuk bersifat searah, di mana semakin baik transparansi yang dirasakan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam implementasi kebijakan TOD di kawasan Lebak Bulus.
2. **Persepsi transparansi kebijakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik.** Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$), sehingga hipotesis penelitian diterima. Dengan demikian, transparansi kebijakan menjadi faktor yang berperan esensial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. **Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak.** Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$), yang berarti variabel persepsi transparansi kebijakan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik.
4. **Variabel persepsi transparansi kebijakan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan tingkat kepercayaan publik.** Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,589, yang berarti bahwa 58,9% variasi tingkat kepercayaan publik dapat dijelaskan oleh persepsi transparansi

kebijakan, sedangkan sisanya sebesar 41,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Secara keseluruhan, transparansi kebijakan memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan TOD di kawasan Lebak Bulus. Hal ini dibuktikan secara empiris melalui seluruh hasil pengujian statistik yang menginterpretasikan adanya pengaruh positif dan signifikan antara transparansi kebijakan terhadap tingkat kepercayaan publik dalam implementasi kebijakan TOD di kawasan Lebak Bulus. Keterbukaan informasi, kejelasan proses, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat mampu meningkatkan persepsi positif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh persepsi transparansi kebijakan terhadap tingkat kepercayaan publik dalam implementasi kebijakan *Transit-Oriented Development* (TOD) di kawasan Lebak Bulus, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

5.2.1 Saran Akademis

Secara akademis, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik, seperti akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta efektivitas komunikasi kebijakan. Hal ini penting mengingat masih terdapat sebesar 41,1% variasi tingkat kepercayaan publik yang dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode yang lebih beraneka ragam, seperti regresi linear berganda atau pendekatan kualitatif, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan TOD di kawasan Lebak Bulus. Peneliti berikutnya juga disarankan untuk memperluas jumlah sampel serta cakupan wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Bahkan, penggunaan pendekatan longitudinal dapat dipertimbangkan untuk melihat dinamika perubahan persepsi transparansi dan kepercayaan publik dari waktu ke waktu.

5.2.2 Saran Praktis

Secara praktis, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat jelas, akurat, dan mudah diakses. Pemerintah juga perlu memaksimalkan pemanfaatan media digital, khususnya media sosial, sebagai sarana utama dalam menyampaikan informasi kebijakan, mengingat mayoritas masyarakat memperoleh informasi melalui platform tersebut. Selain itu, peningkatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar informasi yang diterima lebih komprehensif dan tidak hanya bergantung pada sumber tidak resmi. Pemerintah juga disarankan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki serta kepercayaan terhadap kebijakan yang dijalankan. Di samping itu, transparansi dalam penyampaian dampak kebijakan, baik manfaat maupun potensi risiko, perlu terus ditingkatkan guna membangun kepercayaan publik yang lebih kuat dan berkelanjutan.